

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan pasal 1 undang-undang No. 32 tahun 2004. Dengan adanya hal ini maka diharapkan terjadinya percepatan ekonomi dan mempercepat tujuan pembangunan nasional. Adanya otonomi daerah tentunya juga akan memacu daerah untuk mampu mengelola daerah sendiri agar mampu menjadi daerah yang mandiri dan menjadi sumber bagi pembangunan nasional. Dengan adanya rangsangan yang memacu daerah inilah yang akan membuat daerah berlomba-lomba meningkatkan potensinya masing-masing sehingga mampu menimbulkan suatu percepatan ekonomi. Maka sangatlah jelas bahwa otonomi daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan suatu daerah.

Dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Melalui UU Nomor 33/2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah, secara

akumulasi seharusnya akan lebih menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Investasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercermin melalui belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya (Wahyuningsih, 2011). Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penyediaan sarana fisik dan prasarana yang memadai bagi daerah kabupaten dan kota tersebut. Belanja modal yang merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dan terdapat dalam struktur APBD ini meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya (BPS,2009)

Menurut Abdullah (2013) Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olahraga, stadion, jogging track, halte dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor permerintahan). Pada kenyataannya beberapa proyek fisik menghasilkan output berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik.

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri betapa

pentingnya peranan infrastruktr dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonomi daerah tersebut (Hall, 2009). Oleh karena itu, setiap daerah sekarang ini seolah-olah berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Di kabupaten malaka sendiri pembangunan infrastruktur mendapat perhatian khusus, sehingga pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimilikinya (Setiawan, 2005). Di dalam struktur APBD, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan dalam kelompok belanja modal.

Penelitian teradahulu AlQomariah. A. N. R. Pardanawati. S. L. dan Utami, W. B. (2022) dengan judul Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten boyolali tahun 2007-2020. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber wilayahnya, dipungut berdasarkan peraturan undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu penelitian (Rahmah dan Zein, 2016). Selain itu, terdapat *research gab* dari penelitian (Aulia Afafun Nisa, 2017) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak seimbang untuk mendanai kegiatannya, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi ketidakseimbangan pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna mendanai kebutuhan daerah pada pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah dana alokasi umum (DAU) yang pengalokasianya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang sejalan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU RI N032, 2004). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ni Made Nopian, et al, 2016). Sedangkan terdapat *research gab* pada penelitian (Lily Kusumawati, I Gusti Bagus Wiksuana, 2018) bahwa dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Bagi Hasil atau DBH merupakan dana yang dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah menurut angka persentase guna mendanai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu penelitian (Aulia Afafun Nisa, 2017). Selain itu juga terdapat terdapat *research gab* penelitian dari (Lily Kusumawati, I Gusti Bagus Wiksuana, 2018) bahwa dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terdahulu Said Yunus, Amirullah (2017) dengan judul Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada kabupaten-kabupaten di provinsi Aceh). Hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh akan tetapi tidak signifikan. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 37,6% belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh dan sebesar 62,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Penelitian terdahulu Divya Chaerani Mulia Safitri, Arni Karina, Kumba Digidwiseiso (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal tersebut dibuktikan pada tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan t hitung -3,054. Demikian juga halnya dengan Kinerja Keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal tersebut dibuktikan pada tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dengan t hitung 3,079 Dan Belanja Modal tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dibuktikan signifikansi 0,928 lebih besar dari 0,05 dan t hitung sebesar 0,090.

Penelitian terdahulu Dedy Arifuddin Setiawan, Harsono (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2018.

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah atas nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Setiap belanja daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik atau transparan. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan statistik deskriptif melalui uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas dan juga penelitian sebelumnya maka diambil kesimpulan bahwa judul penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan ekonomi Dengan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi (Studi di Kabupaten Malaka NTT)”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Masalah Penelitian adalah:Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi (Studi di Kabupaten Malaka NTT) di Kabupaten Malaka

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan Masalah Penelitian diatas maka Persoalan Penelitian adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
3. Apakah Dana Bagi Hasil Dapat Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
4. Apakah Dana Bagi Hasil Dapat Memoderasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.4 Tujuan Dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3. Untuk menguji efek moderasi Dana Bagi Hasil dalam pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
4. Untuk menguji efek moderasi Dana Bagi Hasil dalam pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

b. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya

2. Bagi Akademik

- a. Menjadi salah satu referensi dalam penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malaka.
- b. Menjadi sumber pembelajaran dan kajian lebih lanjut bagi penelitian berikutnya yang berkenaan dengan Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malaka .